

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan hutan di Provinsi Jambi tidak pernah lepas dari pembalakan liar, penebangan liar dan perdagangan kayu secara ilegal serta rendahnya penanaman kembali hutan tanaman. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.863/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 Provinsi Jambi memiliki hutan seluas 2.098.535 ha. Namun dari tahun ke tahun kondisi hutan Provinsi Jambi semakin menurun, hal ini disebabkan oleh banyaknya kawasan hutan yang dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu.

Meningkatnya luas kawasan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan perekonomian masyarakat sekitar hutan semakin merosot, tidak terindikasi dan masih tingginya kemiskinan bagi masyarakat yang hidup sekitar hutan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jambi sebanyak 277,8 ribu jiwa atau 7,58% dan angka kemiskinan tersebut bertambah 16,06 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (BPS, 2020). Mengingat tingginya kemiskinan masyarakat sekitar hutan dari tahun ke tahun yang sangat memprihatinkan, maka Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Kuncoro, 2018).

Salah satu bentuk skema perhutanan sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, efektivitas program kerja di HKm merupakan isu penting yang perlu dijelajahi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan bagaimana program tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat sesuai dengan definisi

dari skema hutan kemasyarakatan. Melalui program ini, masyarakat dapat memiliki akses terhadap sumber daya hutan dan mengelolanya secara berkelanjutan serta ramah lingkungan. Program ini juga memberikan tambahan pendapatan dan lahan untuk bercocok tanam melalui ketersediaan lahan dengan memadukan tanaman pertanian dan kehutanan dalam pola tanam gabungan agroforestri, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial. Manfaat lain dari program ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya hutan, sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hutan.

HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri merupakan satu diantara HKm yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Koperasi ini didirikan untuk memungkinkan masyarakat mengelola kawasan hutan secara sah dan legal melalui penerapan praktik pengelolaan hutan lestari. Hutan ini diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada kawasan hutan produksi terbatas seluas  $\pm 1.764$  ha berdasarkan SK No.123/EP.KA.BPMD-PPT.4/V/2016 pada tanggal 11 Mei 2016 di bawah binaan UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi.

Sejauh ini program kerja di HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri memiliki progres yang baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya rencana kerja usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan jangka waktu 10 tahun periode tahun 2017-2026 dalam pemberian bantuan benih/bibit; kegiatan penandaan batas luar areal yang sudah dikelilingi kanal; patroli gabungan rutin antara polhut dan anggota kelompok HKm; pembangunan demplot, sekat kanal, sumur bor dan sosialisasi pencegahan kebakaran melalui pemasangan spanduk bahaya kebakaran; pengembangan kelembagaan melalui pelatihan dan kunjungan ke lokasi usaha; pemasaran hasil hutan bukan kayu yang bermitra dengan pasar lokal; serta penanaman tanaman yang mampu meningkatkan sumber mata air seperti aren, pinang, bungur dan pulai disekitar sungai dan persimpangan kanal.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan pada program kerja yang telah dijalankan, seperti adanya konflik antar masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah dalam perebutan lahan dan alih fungsi Kawasan menjadi perkebunan

kelapa sawit, serta konflik areal HKm yang dikelola oleh PT. Rimba Hutani Mas. Lalu, pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan cukup luas di wilayah HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri hingga merambat ke sekitar HKm dan HTR lainnya, serta terulang kembali pada akhir Oktober 2023 seluas 7 ha yang disebabkan oleh oknum yang sengaja dan tidak bertanggung jawab. Kemudian, terdapat 1 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang tidak aktif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, keterampilan dan pengalaman dalam mengolah hasil.

Maka dari itu penelitian analisis efektivitas program kerja di HKm sangat penting dilakukan, dimana HKm sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada hasil hutan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, serta turut aktif melaksanakan kegiatan yang terstruktur dan teratur sesuai dengan prosedur. Berdasarkan narasi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Kerja Di Hutan Kemasyarakatan Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Wilayah Binaan UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa efektifnya program kerja di HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program kerja di HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai efektivitas program kerja yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan terkhusus pada skema HKm Koperasi Multi Usaha Mandiri yang menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.